

**PENGARUH UPAH, INVESTASI, IPM DAN PENGELUARAN
PEMERINTAH TERHADAP PENGANGGURAN DI PULAU JAWA DAN
BALI TAHUN 2016-2023**

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Abdurrahman Sya'bani
NIM : 20313377
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2025

PENGARUH UPAH, INVESTASI, IPM DAN PENGELUARAN PEMERINTAH
TERHADAP PENGANGGURAN DI PULAU JAWA DAN BALI TAHUN 2016-
2023

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Abdurrahman Sya'bani
NIM : 20313377
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UJI. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Agustus 2025

Penulis



Abdurrahman Sya'bani

LEMBAR PENGESAHAN

Pengaruh Upah, Investasi, IPM dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pengangguran
di Pulau Jawa dan Bali Tahun 2016-2023

Nama : Abdurrahman Sya'bani
NIM : 20313377
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, Juli 2025

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Suharto, S.E., M.Si.

NIP: 933130104

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH UPAH, INVESTASI, IPM DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP
PENGANGGURAN DI PULAU JAWA DAN BALI TAHUN 2016-2023**

Disusun oleh : ABDURRAHMAN SYA'BANI

Nomor Mahasiswa : 20313377

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Kamis, 04 September 2025

Penguji/Pembimbing Skripsi : Suharto, SE., M.Si.

Penguji : Prof. Dr. Drs. Unggul Priyadi, M.Si.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sumber segala ilmu dan kekuatan. Atas kehendak dan rahmat-Nya, saya diberi kesempatan untuk terus berkembang menjadi pribadi yang berpikir kritis, berilmu, beriman, serta mampu menjaga kesabaran. Semoga karya penelitian ini menjadi pijakan awal dalam mewujudkan cita-cita dan impian saya di masa mendatang.

Penelitian ini juga saya persembahkan dengan penuh cinta dan hormat kepada kedua orang tua tercinta dan keluarga saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan atas doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta dukungan yang tak ternilai dalam setiap langkah perjalanan saya. Tanpa ketulusan, kesabaran, dan pengorbanan mereka, penyelesaian tugas akhir ini tidak akan mungkin terwujud. Semoga hasil karya ini menjadi wujud kecil dari rasa terima kasih saya atas segala jerih payah dan cinta yang telah mereka curahkan selama ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT' atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul ***“PENGARUH UPAH, INVESTASI, IPM DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENGANGGURAN DI PULAU JAWA DAN BALI TAHUN 2016-2023”***. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan penuh rasa hormat dan terima kasih ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, serta semangat yang tulus selama proses penyusunan skripsi ini dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D, selaku Kaprodi Ilmu Ekonomi dan seluruh jajaran pengurus Prodi Ilmu ekonomi.
3. Bapak Suharto, S.E., M.Sc. selaku dosen pembimbing yang senantiasa sabar, memberi arahan dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Seluruh dosen dan staff pengajar Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis Ekonomika UII, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Orang tua penulis yang tidak pernah lepas dalam memberi semangat, nasehat, motivasi dan doa.
6. Keluarga penulis yang telah memberikan semangat secara moral dan spiritual, motivasi serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik

7. Teman – teman Sahabat, Diana, Verdong, Abeng, Ipang, Ibal, Bima, Faris, Ala, Raihan, Laila, Kiren serta teman-teman penulis yang tidak dapat ditulis satu persatu yang telah senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi di Yogyakarta
8. Teman-teman bimbingan penulis yang sudah memberikan informasi, ilmu, dan bersedia disibukan oleh penulis.
9. Tak lupa, teman-teman angkatan 2020 Program Studi Ekonomi Pembangunan yang telah banyak membantu, mendukung, dan menyemangati dalam perkuliahan.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi. Semoga karya ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan, terutama bagi almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis juga berharap skripsi ini dapat menjadi salah satu referensi yang berguna bagi pembaca yang memiliki kepentingan dalam topik terkait.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	12
2.1 Kajian Pustaka	12
2.2 Landasan Teori	18
2.2.1 Pengangguran.....	18
2.2.2 Investasi.....	18
2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	19
2.2.4 Upah	20
2.2.5 Pengeluaran Pemerintah	22
2.3 Kerangka Pemikiran.....	23
2.4 Hipotesis Penelitian	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Jenis dan Pengumpulan Data.....	25
3.2 Variabel Operasional.....	25
Variabel Dependen	25
Variabel Independen.....	26
3.3 Metode Analisis	27

3.3.2	<i>Fixed Effect Model</i>	27
3.3.3	<i>Random Effect Model</i>	27
3.3.4	Uji Model	28
3.3.5	Uji Statistik.....	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		31
4.1	Deskripsi Data Penelitian.....	31
4.3	Pemilihan Model Regresi	32
4.3.3	Uji Chow.....	32
4.3.2	Uji Hausman.....	32
4.4	Model Terbaik.....	33
4.5	Uji Hipotesis	34
4.5.1	Koefisien Determinasi	34
4.5.2	Uji F.....	34
4.5.3	Uji T.....	34
4.6	Analisis Ekonomi.....	35
4.6.1	Hubungan Variabel Upah terhadap Pengangguran	36
4.6.2	Hubungan Variabel Investasi terhadap Pengangguran	37
4.6.3	Hubungan Variabel Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pengangguran	38
4.6.4	Hubungan Variabel Pengeluaran Pemerintah terhadap Pengangguran ..	39
BAB V PENUTUP.....		42
5.1	Kesimpulan	42
5.1	Implikasi	42
DAFTAR PUSTAKA.....		45
LAMPIRAN.....		52

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 <i>Fixed Effect Model</i>	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.2 Hasil Uji Chow	32
Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman.....	32
Tabel 4.5 <i>Fixed Effect Model</i>	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rata-rata Pengangguran (Persen) di Pulau Jawa dan Bali Tahun 2019-2023	3
Gambar 1.2 Rata-rata Nilai Investasi (Rupiah) di Pulau Jawa dan Bali Tahun 2019-2023	3
Gambar 1.3 Rata-rata Tingkat IPM (persen) di Pulau Jawa dan Bali Tahun 2019-2023	5
Gambar 1.4 Rata-rata Tingkat Upah (Rupiah) di Pulau Jawa dan Bali Tahun 2019-2023	6
Gambar 1.5 Rata-rata Pengeluaran Pemerintah (Milyar Rupiah) di Pulau Jawa dan Bali Tahun 2019-2023.....	7
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian	52
Lampiran 2. <i>Fixed Effect Model</i>	56
Lampiran 3. Random Effect Model	57
Lampiran 4. Uji Chow	57
Lampiran 5. Uji Hausman	58

ABSTRAK

Pengangguran merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, khususnya di wilayah padat penduduk seperti Pulau Jawa dan Bali. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan ketersediaan lapangan kerja menyebabkan tingginya tingkat pengangguran terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh upah, investasi, indeks pembangunan manusia (IPM), dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran di Pulau Jawa dan Bali pada periode 2016–2023. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel dari tujuh provinsi dan dianalisis menggunakan metode regresi linear berganda dengan *Fixed Effect Model* yang dipilih melalui uji Chow dan uji Hausman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel upah berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat pengangguran dengan nilai Prob. Sebesar 0.000 artinya kenaikan upah minimum cenderung menurunkan pengangguran. Sementara itu, variabel investasi dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Provinsi yang ada di Pulau Jawa dan Bali. Indeks pembangunan manusia (IPM) justru menunjukkan pengaruh signifikan positif dengan nilai Prob. Sebesar 0.000 yang mengindikasikan bahwa peningkatan IPM tidak serta-merta menurunkan pengangguran karena tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan kualitas tenaga kerja. Secara simultan, seluruh variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Pulau Jawa dan Bali.

Kata Kunci: Upah, Investasi, IPM, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki tujuan untuk mencapai suatu kesejahteraan. Upaya ini mensyaratkan adanya keseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan kerja. Namun, saat ini terjadi ketidakseimbangan, di mana angkatan kerja melebihi jumlah kesempatan kerja yang mengakibatkan peningkatan tingkat pengangguran (Radila et al., 2021). Pengangguran adalah seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan tidak memiliki pekerjaan yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Kondisi ini sering kali disebabkan oleh lambatnya pertumbuhan lapangan kerja yang tidak mampu menampung jumlah tenaga kerja yang siap bekerja. Di negara berkembang, permasalahan ini semakin menonjol karena tingginya populasi penduduk yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja, sehingga tidak semua angkatan kerja dapat terserap dan akhirnya berujung pada pengangguran (Pandiangan et al., 2021).

Pengangguran merupakan salah satu penyakit ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi (Ishak, 2018). Sebagai salah satu negara dengan populasi terpadat di dunia, Indonesia memiliki banyak penduduk usia produktif. Hal ini menunjukkan potensi besar kekuatan tenaga kerja. Namun pada kenyataannya, Indonesia berada di peringkat kedua untuk tingkat pengangguran tertinggi di Asia Tenggara, menunjukkan ketidakseimbangan antara ketersediaan angkatan kerja dan kesempatan kerja yang ada (Karisma et al., 2021).

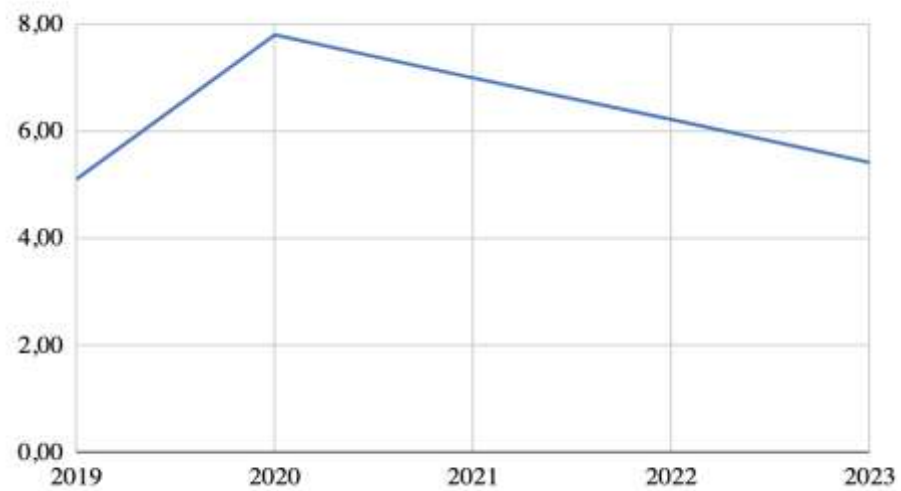
Masalah tingkat pengangguran yang tinggi adalah masalah utama dan mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena pertumbuhan tenaga kerja baru jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat disediakan setiap tahunnya.

Pertumbuhan tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan lapangan kerja menimbulkan pengangguran yang tinggi. Pengangguran merupakan salah satu masalah utama dalam jangka pendek yang selalu dihadapi setiap negara. Oleh karena itu, setiap sistem perekonomian pasti berhadapan dengan masalah pengangguran, terutama pengangguran alamiah (Cut Nova Rianda, 2020).

Pulau Jawa dan Pulau Bali memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional sekaligus menghadapi persoalan ketenagakerjaan yang kompleks. Jawa merupakan pusat pemerintahan, industri, perdagangan, serta pendidikan yang menampung lebih dari separuh total penduduk Indonesia, sementara Bali menjadi motor penggerak ekonomi melalui sektor pariwisata yang mendunia. Kepadatan penduduk di Jawa dan tingginya arus migrasi tenaga kerja ke Bali menimbulkan tekanan besar pada pasar kerja, sehingga angka pengangguran di wilayah ini relatif tinggi dibandingkan dengan wilayah lain. Selain itu, ketergantungan Jawa pada sektor industri manufaktur dan Bali pada sektor pariwisata menjadikan keduanya sangat rentan terhadap guncangan ekonomi, yang dapat memicu peningkatan pengangguran secara cepat. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di Jawa seperti Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta masih memiliki tingkat pengangguran terbuka yang relatif tinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Mengingat kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai lebih dari separuh total perekonomian Indonesia, kondisi ketenagakerjaan di Jawa–Bali tidak hanya penting bagi wilayah tersebut, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional.

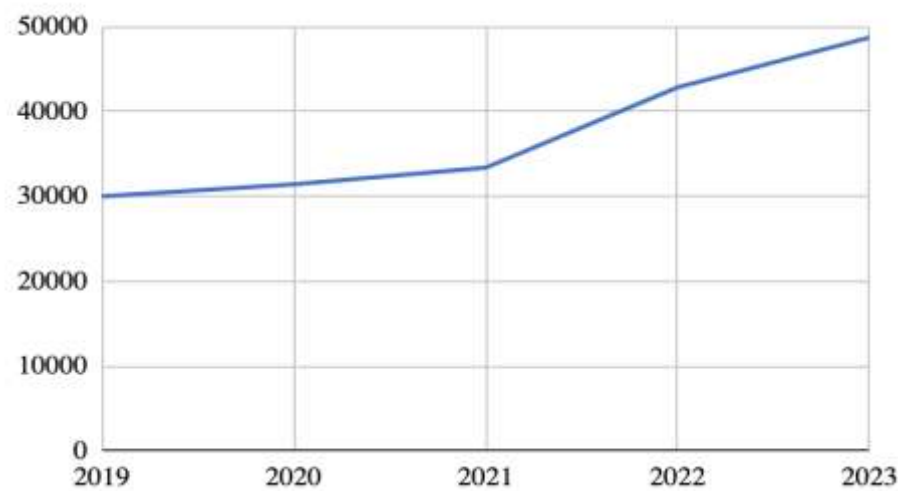
Berdasarkan laporan (Badan Pusat Statistik, 2024), pada Februari 2024 jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai sekitar 7,2 juta orang. Pada periode tersebut, tingkat pengangguran tertinggi tercatat di Provinsi Banten (7,02%), diikuti oleh Kepulauan Riau (6,94%), Jawa Barat (6,91%), DKI Jakarta (6,03%), dan Papua Barat Daya (6,02%). Dapat

dikatakan bahwa mayoritas provinsi yang termasuk kategori pengangguran tinggi berasal dari Pulau Jawa.



Gambar 1.1 Rata-rata Pengangguran (Persen) di Pulau Jawa dan Bali Tahun 2019-2023

Sumber: BPS, 2024



Gambar 1.2 Rata-rata Nilai Investasi (Rupiah) di Pulau Jawa dan Bali Tahun 2019-2023

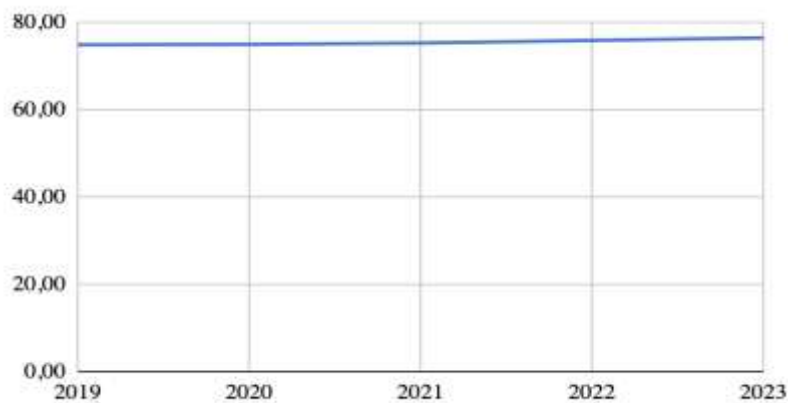
Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan data BPS (2024) mengenai tingkat pengangguran di Pulau Jawa dan Bali pada periode 2019 - 2023 menunjukkan tren yang menurun dari 7,80% menjadi 5,41%, tetapi sempat meningkat pada 2019-2020. Kenaikan ini didukung oleh nilai investasi (rupiah) yang meningkat juga sehingga mendorong kenaikan pengangguran. Adapun nilai investasi pada suatu industri yang ada dimana berkaitan dengan tenaga kerja yang akan dibutuhkan. Artinya ketika investasi mengalami peningkatan maka produksi perusahaan dapat bertambah sehingga membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Pulau Jawa dan Bali dimana hubungan antara investasi dan pengangguran bersifat positif, kenaikan investasi justru meningkatkan pengangguran yang tersedia.

Investasi merupakan salah satu indikator untuk meningkatkan pembangunan nasional yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat (Karisma et al., 2021). Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan salah satu bentuk investasi yang berasal dari dalam negeri dan dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri. Peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan guna menyerap banyak tenaga kerja juga dipengaruhi oleh besarnya investasi. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Dari perspektif makroekonomi, peningkatan investasi akan menstimulasi permintaan agregat dan pendapatan nasional. Peningkatan dalam permintaan agregat tersebut pada gilirannya akan meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian yang kemudian akan diikuti oleh pertambahan dalam kebutuhan akan tenaga kerja untuk proses produksi (Sari, 2016).

Tingkat pengangguran yang dominan di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia adalah pengangguran di kalangan usia muda dan pengangguran yang terdidik, yang terus bertambah jumlahnya setiap tahunnya karena hasil dari perguruan tinggi. Pengangguran usia muda juga cenderung lebih tinggi daripada pengangguran pada umumnya, dengan faktor

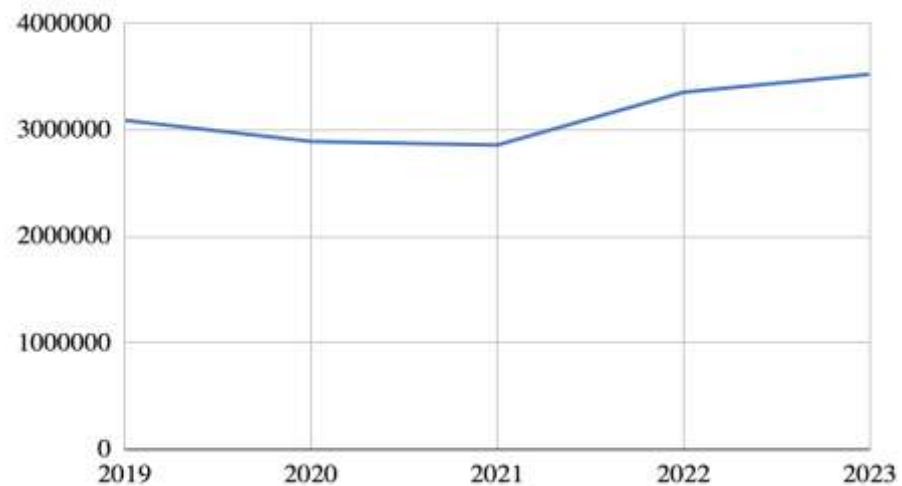
penyebabnya yaitu faktor struktural yang meliputi rendahnya keterampilan yang dimiliki saat lulus sekolah dan kurangnya informasi tentang peluang pekerjaan, serta faktor non-struktural yang termasuk meningkatnya upah buruh yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja dan berkurangnya lapangan kerja (Todaro, 2004).



Gambar 1.3 Rata-rata Tingkat IPM (persen) di Pulau Jawa dan Bali Tahun 2019-2023

Sumber: BPS, 2024

Pada gambar 1.3 menunjukkan bahwa data IPM di Pulau Jawa dan Bali mengalami peningkatan dari 74,83% hingga 76,43% dalam 5 tahun terakhir. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan tiga dimensi utama dalam pembangunan, yaitu kesehatan untuk menjamin umur panjang dan kehidupan yang sehat, pendidikan guna memperoleh pengetahuan, serta standar hidup yang layak. Ketika tenaga kerja memiliki kondisi kesehatan yang baik, tingkat pendidikan yang memadai, dan kesejahteraan yang tercukupi, maka kualitas hasil kerja yang dihasilkan cenderung meningkat. Sebaliknya, jika kondisi tenaga kerja memburuk dalam aspek tersebut, maka mutu pekerjaan pun akan menurun. Oleh karena itu, IPM merupakan tolok ukur fundamental untuk menilai kualitas sumber daya manusia yang siap memasuki dunia kerja, yang memiliki peran penting dalam upaya mengatasi tingginya angka pengangguran di suatu daerah (Mahroji dan Lin, 2019).

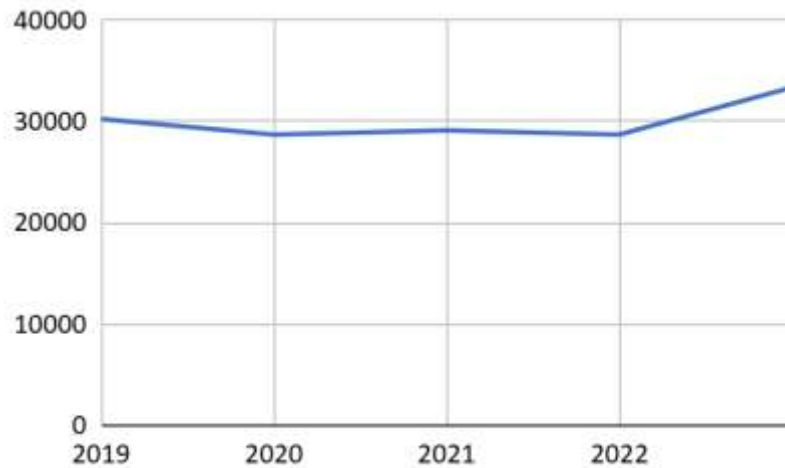


Gambar 1.4 Rata-rata Tingkat Upah (Rupiah) di Pulau Jawa dan Bali Tahun 2019-2023

Sumber: BPS, 2024

Data upah yang ditunjukkan pada gambar 1.4 mencerminkan rata-rata upah sebesar Rp2.857.005 yang menurun pada 2021, tetapi kembali meningkat hingga Rp35.209.670 pada tahun berikutnya. Bagi pekerja, upah dipandang sebagai sumber utama penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga mendorong mereka untuk berusaha meningkatkan pendapatan yang diperoleh (Soekapdjo & Oktavia, 2021). Peningkatan upah harus diikuti dengan kesesuaian kinerja tenaga kerjanya sehingga dapat mengurangi pengangguran. Ketidaksesuaian dalam pemberian upah, seperti ketika seorang pekerja dengan kinerja rendah memperoleh upah yang tinggi, dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan suatu unit usaha. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya biaya produksi yang tidak sebanding dengan output yang dihasilkan. Oleh karena itu, penetapan upah sebaiknya mempertimbangkan tingkat kinerja yang dicapai oleh pekerja. Sebaliknya, apabila upah yang diberikan terlalu rendah sementara pekerja memiliki tingkat produktivitas yang tinggi, maka hal tersebut berisiko menimbulkan ketidakpuasan kerja yang berujung pada keputusan pekerja

untuk berhenti atau menjadi penganggur musiman guna mencari pekerjaan di tempat lain yang menawarkan kompensasi lebih baik (Pramudjasi et al., 2019).



Gambar 1.5 Rata-rata Pengeluaran Pemerintah (Milyar Rupiah) di Pulau Jawa dan Bali Tahun 2019-2023

Sumber: BPS, 2024

Bukan hanya faktor upah, investasi dan IPM saja yang dapat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Pulau Jawa dan Bali. Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat pengangguran adalah pengeluaran pemerintah. Pada gambar 1.5 yang menunjukkan data rata-rata pengeluaran pemerintah dari tahun 2019-2023 di Pulau Jawa dan Bali. Pengeluaran pemerintah paling rendah terjadi saat 2020 dimana pemerintah hanya mengeluarkan dana sebanyak 28.679,86 Milyar rupiah sedangkan pengeluaran pemerintah terbanyak pada tahun 2023 sebanyak 33.359,35 milyar rupiah. Adapun pengeluaran pemerintah yang dipergunakan untuk membeli barang dan jasa akan mendorong terciptanya lapangan kerja. Pemerintah dalam upaya menyediakan barang publik secara tidak langsung akan membuka kesempatan kerja. Lapangan kerja yang tersedia akibat dari aktivitas pemerintah akan dipengaruhi oleh jenis pengeluaran. Pengeluaran pemerintah dapat memperbesar *Output* yang dihasilkan oleh suatu sektor ekonomi. Selain itu, juga dapat menaikkan pendapatan masyarakat karena

pengeluaran pemerintah akan menjadi penerimaan masyarakat sehingga mendorong permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat akan mendorong produsen untuk meningkatkan *Output* produksinya, salah satunya tenaga kerja. Dengan demikian kenaikan pengeluaran pemerintah akan menambah kesempatan kerja, proyek-proyek yang dibiayai pemerintah seperti membangun jalan, sekolah dan fasilitas umum yang lainnya bersifat pada karya dapat menaikkan penyerapan tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran (Mahendra et al., 2022).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh upah terhadap tingkat pengangguran di Pulau Jawa dan Bali tahun 2016-2023?
2. Bagaimana pengaruh investasi terhadap tingkat pengangguran di Pulau Jawa dan Bali tahun 2016-2023?
3. Bagaimana pengaruh IPM terhadap tingkat pengangguran di Pulau Jawa dan Bali tahun 2016-2023?
4. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran di Pulau Jawa dan Bali tahun 2016-2023?
5. Bagaimana pengaruh upah, investasi, IPM dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran di Pulau Jawa dan Bali tahun 2016-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh upah terhadap tingkat pengangguran di Pulau Jawa dan Bali tahun 2016-2023
2. Menganalisis pengaruh investasi terhadap tingkat pengangguran di Pulau Jawa dan Bali tahun 2016-2023
3. Menganalisis pengaruh IPM terhadap tingkat pengangguran di Pulau Jawa dan Bali tahun 2016-2023

4. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran di Pulau Jawa dan Bali tahun 2016-2023
5. Menganalisis pengaruh upah, investasi, IPM dan penegluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran di Pulau Jawa dan Bali tahun 2016-2023?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis maupun teoritis, yang antara lain:

a. Manfaat Teoritis

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasan dalam ekonomi makro, terutama mengenai dampak upah, investasi, IPM, dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran di Pulau Jawa dan Bali. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi penelitian lanjutan yang mempelajari pengaruh faktor-faktor ekonomi terhadap pengangguran.
2. Pengembangan Model Analisis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data panel yang dapat dijadikan model analisis yang efektif untuk memahami hubungan antara variabel-variabel ekonomi yang diteliti. Hasil penelitian ini berpotensi meningkatkan pengembangan model analisis yang lebih presisi dan efektif dalam konteks regional tersebut.
3. Pengembangan Kebijakan Pemerintah. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana upah, investasi, IPM, dan pengeluaran pemerintah berkontribusi terhadap tingkat pengangguran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan evaluasi dan formulasi kebijakan pemerintah untuk mengatasi tantangan pengangguran di kedua wilayah tersebut.

b. Manfaat Praktis

1. Pengembangan Kebijakan Pemerintah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan konkret bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani masalah pengangguran. Pemerintah dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk merancang strategi yang tepat dalam meningkatkan upah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengurangi pengangguran.
2. Pengembangan Program Sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memfasilitasi pengembangan program sosial yang lebih efektif. Pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan harapan dapat menurunkan tingkat pengangguran.
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dengan memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pengangguran, baik pemerintah maupun sektor pendidikan dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keterampilan dan kualifikasi tenaga kerja di Pulau Jawa dan Bali. Hal tersebut diharapkan berpotensi meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal dan mengurangi tingkat pengangguran struktural.
4. Pengembangan Laporan dan Evaluasi. Penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai referensi penting untuk evaluasi dan laporan yang mendukung pengembangan kebijakan dan program di masa mendatang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengarahkan penelitian selanjutnya dan membantu dalam penyusunan laporan yang lebih akurat serta bermanfaat bagi kegiatan evaluasi kebijakan di masa depan..

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I “pendahuluan” menguraikan konteks latar belakang penelitian, merinci permasalahan yang dihadapi, menetapkan tujuan penelitian, menjelaskan manfaat penelitian, serta menjelaskan sistematika pengembangan makalah

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Pada bab II “kajian pustaka” memaparkan rangkuman mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian penulis tentang faktor-faktor yang memengaruhi jumlah penduduk miskin. Informasi dari penelitian-penelitian terdahulu akan digunakan sebagai referensi dan pertimbangan dalam hasil analisis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab III “metodologi penelitian” menjelaskan tentang elemen penting dalam proses penelitian, termasuk variabel penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data yang diterapkan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV “hasil dan pembahasan” merupakan inti dari sebuah skripsi karena pada bab ini menggambarkan proses analisis dan interpretasi data yang dilakukan penulis untuk menjawab pertanyaan penelitian, menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap topik yang diteliti dan menghubungkan temuan dengan literatur yang relevan. Selain itu pada bab ini memuat dan menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan

BAB V PENUTUP

Pada bab V “penutup” berisi kesimpulan dan rekomendasi. Pada bab ini penulis mengevaluasi dan merangkum temuan-temuan yang telah dijelaskan pada bab IV. Pada bab ini mencakup penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan pada bab ini berisi rekomendasi atau saran yang

dapat diberikan kepada penelitian selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Tabel 2.1 Kajian Pustaka

Judul Penelitian, Peneliti & Tahun	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Effendy (2019)	Regresi linier berganda (Time Series 2003-2018)	Upah minimum berpengaruh signifikan menurunkan pengangguran; inflasi berpengaruh positif; pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh	Variabel independen berbeda (inflasi & pertumbuhan ekonomi), periode, dan jenis data
Pengaruh PDRB, Inflasi, Upah Minimum, dan Jumlah Penduduk terhadap Pengangguran di Indonesia (2011–2017) Sembiring & Sasongko (2019)	Regresi data panel	PDRB, inflasi, dan upah minimum berpengaruh negatif signifikan; jumlah penduduk tidak berpengaruh	Perbedaan periode dan variabel independen
Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan IPM terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	Regresi linier berganda (Time Series 2008–2017)	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif; inflasi & IPM tidak berpengaruh	Lokasi, jenis data, dan variabel independen berbeda

di Manado Lamatenggo et al. (2019)			
Pengaruh Pendidikan dan Investasi terhadap Pengangguran di Jawa Karisma et al. (2021)	Regresi linier berganda	Investasi dalam negeri berpengaruh signifikan; pendidikan & investasi asing tidak berpengaruh	Variabel pendidikan digunakan, periode berbeda
Analisis Jumlah Penduduk, PMA, Pertumbuhan Ekonomi & Inflasi terhadap TPT di Indonesia (2000–2020) Pandiangan et al. (2021)	Regresi linier berganda (Time Series)	Jumlah penduduk berpengaruh signifikan negatif; PMDN, pertumbuhan ekonomi & inflasi tidak signifikan	Variabel independen & jenis data berbeda
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, & Kemiskinan terhadap Pengangguran di Bali (2007–2020) Radila et al. (2021)	Regresi linier berganda (Time Series)	Pertumbuhan ekonomi & pendidikan berpengaruh negatif signifikan; kemiskinan berpengaruh positif signifikan	Variabel independen & periode berbeda
Pengaruh PMDN & Pengeluaran Pemerintah terhadap TPT melalui Pertumbuhan Ekonomi di Banten (2007–2021) Kusumaningtyas &	Regresi linier berganda (Time Series)	PMDN & pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh langsung; pengeluaran pemerintah berpengaruh langsung	Variabel & periode berbeda

Muchtolifah (2023)			
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, & IPM terhadap TPT di Sidoarjo (2006– 2020) Yuniarti & Imaningsih (2022)	Regresi linier berganda (Time Series)	Pertumbuhan ekonomi & kemiskinan signifikan; IPM tidak berpengaruh	Variabel & lokasi berbeda
Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, IPM, Pertumbuhan Ekonomi, & Investasi terhadap Pengangguran di Sulawesi Selatan (2017–2019) Kuswiyati & Utomo (2022)	Regresi data panel	Pertumbuhan ekonomi & investasi signifikan; pengeluaran pemerintah & IPM tidak berpengaruh	Lokasi, periode, dan variabel berbeda
Pengaruh Harga Minyak Dunia, Pertumbuhan Ekonomi, & Pengeluaran Pemerintah terhadap Pengangguran di Indonesia Mahendra et al. (2022)	Regresi linier berganda	Pertumbuhan ekonomi & pengeluaran pemerintah signifikan; harga minyak dunia tidak signifikan	Variabel independen berbeda

Penelitian Effendy (2019) yang berjudul “Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia”. Metode penelitian

yang digunakan yaitu regresi linier berganda dengan data *Time Series* 2003-2018. Adapun hasilnya menyatakan bahwa upah minimum sebagai variabel yang sangat besar pengaruhnya terhadap penurunan tingkat pengangguran. Inflasi berpengaruh secara positif, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi sebagai variabel independen, periode tahun yang diterapkan dan jenis data yang digunakan.

Penelitian Sembiring & Sasongko (2019) yang berjudul “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Upah Minimum, dan Jumlah Penduduk terhadap Pengangguran di Indonesia Periode 2011 –2017”. Metode penelitian yang digunakan yaitu regresi data panel. Hasilnya menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto, inflasi dan upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran. Sementara, jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap pengangguran. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu periode tahun yang diterapkan serta PDRB dan inflasi sebagai variabel independen.

Penelitian Lamatenggo et al. (2019) yang berjudul “Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Manado”. Metode penelitian yang digunakan yaitu regresi linier berganda dengan data *Time Series* 2008-2017. Adapun hasilnya menyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara negatif terhadap pengangguran di Kota Manado. Sementara, inflasi dan IPM tidak memiliki pengaruh terhadap pengangguran. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu lokasi penelitian, jenis data yang digunakan dan variabel independen yang diterapkan.

Penelitian Karisma et al. (2021) yang berjudul “Pengaruh Pendidikan dan Investasi terhadap Pengangguran di Jawa”. Metode penelitian yang digunakan yaitu regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa investasi yang terdiri dari penanaman modal dalam negeri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel pengangguran. Sementara pendidikan dan investasi yang

terdiri dari penanaman modal asing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel pengangguran. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu periode tahun yang diterapkan dan pendidikan sebagai variabel independen.

Penelitian Pandiangan et al. (2021) yang berjudul “Analisis pengaruh Jumlah Penduduk, Penanaman Modal Asing, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2000-2020”. Penelitian tersebut menggunakan metode regresi linier berganda dengan data *time series*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia, sementara itu, penanaman modal dalam negeri, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu jenis data yang digunakan dan variabel independen yang diterapkan.

Penelitian Radila et al. (2021). yang berjudul “Analisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kemiskinan terhadap Pengangguran di Bali”. Metode penelitian yang digunakan yaitu regresi linier berganda dengan data *Time Series* 2007-2020. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan variabel pendidikan memiliki pengaruh signifikan yang negatif terhadap pengangguran. Sementara pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel pengangguran. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu periode tahun yang diterapkan serta pendidikan dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen.

Penelitian Kusumaningtyas & Muchtolifah (2023) yang berjudul “Pengaruh PMDN dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten”. Metode penelitian yang digunakan yaitu regresi linier berganda dengan data *Time Series* 2007-2021. Adapun hasilnya menyatakan bahwa secara parsial Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan pertumbuhan ekonomi tidak memberikan pengaruh langsung terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Namun, pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh langsung terhadap pengangguran terbuka. Sementara itu, secara tidak langsung, baik PMDN maupun pengeluaran pemerintah tidak menunjukkan pengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka melalui variabel pertumbuhan ekonomi. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu jenis data yang digunakan, tahun periode dan variabel independen yang digunakan.

Penelitian Yuniarti & Imaningsih (2022) yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan Dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sidoarjo”. Metode penelitian yang digunakan yaitu regresi linier berganda dengan data *Time Series* 2006-2020. Hasilnya menunjukkan bahwa secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan yang berpengaruh negatif signifikan dan positif signifikan, sedangkan variabel Indeks Pembangunan Manusia tidak memiliki pengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sidoarjo. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan sebagai variabel independen, jenis data dan periode tahun yang diterapkan.

Penelitian Kuswiyati & Utomo (2022) yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, IPM, Pertumbuhan Ekonomi, dan Investasi terhadap Tingkat Pengangguran di Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019”. Metode penelitian yang digunakan yaitu regresi linier data panel. Adapun hasilnya menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran, sedangkan pengeluaran pemerintah dan indeks pembangunan manusia tidak berdampak pada tingkat pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017-2019. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu lokasi penelitian, tahun periode dan variabel independen yang digunakan.

Penelitian Mahendra et al., (2022) yang berjudul “Analisis Pengaruh Harga Minyak Dunia, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pengangguran Dengan Inflasi Sebagai Variabel Moderating di

Indonesia”. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Sementara harga minyak dunia tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen dan periode tahun yang diterapkan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengangguran

Pengangguran adalah individu-individu yang tergolong dalam angkatan kerja dan memiliki keinginan untuk bekerja, namun belum memperoleh kesempatan kerja. Badan Pusat Statistik memperluas definisi ini dengan mengkategorikan pengangguran sebagai penduduk yang tidak bekerja, namun sedang aktif mencari pekerjaan, sedang dalam proses menyiapkan usaha baru, atau sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum memulai aktivitas kerjanya (Kusumaningtyas & Muchtolifah, 2023). Pengangguran mengakibatkan orang tidak memiliki pendapatan dan mendorong mereka jatuh ke jurang kemiskinan. Secara umum pemerintah mengatasi pengangguran dengan mengupayakan memperluas kesempatan kerja, baik di sektor pemerintahan maupun sektor swasta (Ishak, 2018). Sementara itu, rasio atau perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam satuan persen disebut sebagai tingkat pengangguran terbuka (TPT) (Kusumaningtyas & Muchtolifah, 2023).

2.2.2 Investasi

Investasi, yang juga dikenal dengan istilah penanaman modal merupakan kegiatan yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dimana kegiatan investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui investasi, kapasitas produksi suatu usaha dapat meningkat, sehingga berdampak pada perluasan aktivitas ekonomi dan bertambahnya kesempatan kerja. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia (Karisma et al., 2021). Berdasarkan sumber kepemilikan modal, investasi swasta dibedakan menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Menurut UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 penanaman modal dalam negeri (PMDN) didefinisikan sebagai kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri (Kusumaningtyas & Muchtolifah, 2023).

Hubungan Investasi dengan Pengangguran

Besarnya investasi yang terjadi dalam masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Investasi yang meningkat akan mendorong aktivitas produksi sehingga menciptakan lapangan kerja baru. Dengan bertambahnya kesempatan kerja tersebut, jumlah pengangguran di masyarakat cenderung menurun. Oleh karena itu, terdapat hubungan negatif antara investasi dan pengangguran, yang berarti saat tingkat investasi naik, tingkat pengangguran menurun, dan sebaliknya. Namun, jika investasi yang dilakukan bersifat padat modal, peningkatan investasi tersebut tidak akan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di pasar kerja (Sucitrawati & Arka, 2011).

2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indikator yang mengukur pencapaian pembangunan manusia berdasarkan beberapa komponen dasar kualitas hidup yang berpengaruh terhadap tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh seseorang (Mahroji dan Lin, 2019). UNDP (*United Nations Development Programme*) Pembangunan didefinisikan sebagai suatu upaya untuk memperluas pilihan dan kesempatan masyarakat, yang pada dasarnya melibatkan perubahan atau perkembangan yang signifikan. Teori atau definisi pembangunan

manusia pembangunan manusia sendiri mencakup berbagai tahapan kemajuan individu, tidak terbatas pada aspek ekonomi saja.

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2016) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dikembangkan berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak (Mahroji dan Lin, 2019). Apabila ketiga aspek tersebut berhasil dicapai dengan baik oleh suatu negara, maka kemajuan pembangunan manusianya dapat terwujud. Indeks pembangunan manusia pada hakikatnya merupakan konsep yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai bidang (Azfirmawarman et al., 2023).

Hubungan IPM dengan Pengangguran

Teori pertumbuhan baru menekankan peran penting pemerintah dalam pengembangan modal manusia (human capital) untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dengan adanya investasi di bidang pendidikan, kualitas sumber daya manusia diharapkan meningkat, yang tercermin dari bertambahnya pengetahuan dan keterampilan individu. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, semakin besar pula kemampuan dan keahlian yang dimilikinya, sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas. Kondisi ini pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan perusahaan, memperluas penyerapan tenaga kerja, dan menurunkan tingkat pengangguran (Soekapdjo & Oktavia, 2021).

2.2.4 Upah

Upah merupakan imbalan yang diterima karyawan dari pengusaha sebagai kompensasi atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Imbalan tersebut dapat berupa uang yang diberikan berdasarkan kesepakatan atau aturan hukum yang berlaku, serta sesuai dengan perjanjian kerja antara keduanya. Selain gaji pokok, upah juga bisa mencakup tunjangan untuk karyawan dan keluarganya. Dengan kata lain, upah berfungsi sebagai balas jasa atas usaha kerja yang diberikan karyawan, dan besarnya pembayaran disesuaikan dengan tingkat produktivitas

yang dihasilkan. Pengusaha membayarkan upah berdasarkan tingkat usaha atau produktivitas yang telah diberikan oleh karyawan (Syam, 2015).

Dalam perspektif ekonomi, upah diartikan sebagai imbalan atas jasa fisik dan mental yang diberikan oleh pekerja kepada pengusaha. Upah minimum provinsi merupakan batas upah terendah yang berlaku di seluruh kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Tujuan penerapan kebijakan upah minimum bertujuan untuk melindungi pekerja dari eksploitasi dengan memastikan mereka menerima upah yang layak sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Selain itu, upah minimum juga berfungsi sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan atau miskin (Putri & Hutabarat, 2024).

Penetapan upah minimum oleh pemerintah bertujuan melindungi pekerja dan menjamin kesejahteraan mereka. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini sering menimbulkan konsekuensi ganda. Kenaikan upah minimum yang ditetapkan lebih tinggi dari produktivitas dapat meningkatkan biaya produksi perusahaan, sehingga menurunkan permintaan tenaga kerja. Sementara itu, dari sisi pekerja, kenaikan upah mendorong semakin banyak orang masuk ke pasar kerja, sehingga menciptakan kelebihan penawaran tenaga kerja. Kondisi ini dapat menimbulkan pengangguran apabila jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta.

Hubungan Upah dengan Pengangguran

Dalam teori pasar kerja, tingkat upah ditentukan melalui interaksi antara permintaan tenaga kerja yang berasal dari perusahaan dan penawaran tenaga kerja yang berasal dari individu yang siap bekerja. Pada titik keseimbangan, terbentuklah tingkat upah keseimbangan dan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam perekonomian.

Kenaikan upah di atas tingkat keseimbangan pasar berpotensi menimbulkan kelebihan penawaran tenaga kerja (*excess supply*). Artinya, semakin banyak orang yang ingin bekerja karena tertarik dengan upah tinggi, namun

perusahaan justru mengurangi permintaan tenaga kerja karena biaya produksi meningkat. Hal ini mengakibatkan sebagian tenaga kerja tidak terserap dan berujung pada meningkatnya angka pengangguran. Dengan demikian, secara teoritis, terdapat hubungan positif antara upah dan pengangguran: semakin tinggi upah yang ditetapkan, semakin tinggi pula tingkat pengangguran.

Fenomena ini sering terlihat pada perusahaan padat karya yang sensitif terhadap biaya tenaga kerja. Misalnya, ketika upah minimum naik tajam, perusahaan dapat mengurangi perekrutan tenaga kerja baru, mempercepat otomatisasi, atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) demi menekan biaya. Oleh sebab itu, kenaikan upah yang tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas justru dapat memperburuk kondisi ketenagakerjaan.

Sejumlah penelitian empiris mendukung pandangan ini. Hasibuan (2023) menemukan bahwa kenaikan upah minimum di beberapa provinsi di Indonesia berdampak positif terhadap pengangguran karena tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Komara (2020) yang menunjukkan bahwa kenaikan UMR dapat menambah pengangguran di sektor industri padat karya di Jawa Barat. Selain itu, Lazuardi dan Santoso (2024) menemukan bahwa kenaikan upah minimum di Jawa Barat secara signifikan meningkatkan tingkat pengangguran, sesuai dengan mekanisme pasar kerja. Ghazali dan Aji (2024) juga menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif terhadap pengangguran di Jawa Barat, meskipun pertumbuhan ekonomi mampu menekan pengangguran.

2.2.5 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah belanja sektor pemerintah termasuk pembelian barang, jasa dan pembayaran subsidi. Pengeluaran pemerintah mengacu pada pengeluaran pemerintah untuk memproduksi dan menyediakan layanan kepada publik, seperti pertahanan negara, sekolah umum, layanan kesehatan, dan gaji pegawai pemerintah (BEA, 2019). Pengeluaran pemerintah digunakan untuk melakukan fungsi-fungsi penting pemerintahan (Syahputra et al., 2019).

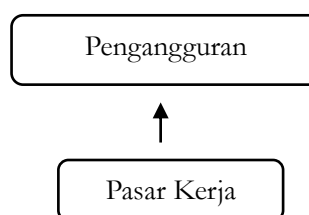
Pemerintah menggunakan anggaran belanja sebagai alat untuk merencanakan dan mengendalikan kondisi fisik serta keuangan negara. Anggaran belanja mencerminkan rencana pengeluaran serta program-program yang akan dijalankan pemerintah, sekaligus memperkirakan pendapatan yang diperoleh dari sistem perpajakan selama satu tahun anggaran. Dokumen anggaran ini biasanya mencakup daftar program spesifik seperti pendidikan, kesejahteraan sosial, pertahanan, dan lain-lain, serta berbagai sumber pajak seperti pajak penghasilan, pajak pribadi, dan pajak asuransi sosial. Secara ekonomi, anggaran belanja pemerintah memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai instrumen untuk mengatur prioritas nasional dan mengalokasikan *output* nasional antara konsumsi publik, konsumsi pribadi, dan investasi. (Kaharudin, 2019).

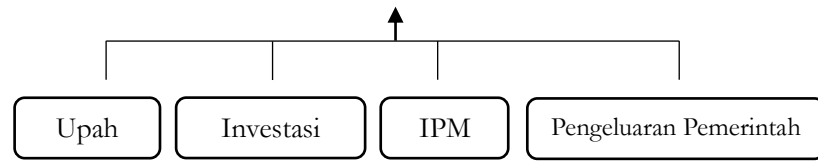
Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Pengangguran

Besarnya belanja yang dilakukan oleh daerah maka dapat menstimulus kegiatan perekonomian serta mampu mengurangi pengangguran. dibutuhkan tenaga kerja. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa ketika belanja digunakan untuk belanja modal, seperti tanah, yang nantinya digunakan untuk membangun sebuah pabrik. Dengan adanya pabrik maka akan membutuhkan tenaga kerja sehingga terjadinya peningkatan penyerapan tenaga kerja. Kenaikan ini yang kemudian dapat mengurangi jumlah pengangguran (Zufikar et al., 2021). Dapat dikatakan bahwa dengan pengalokasian pengeluaran pemerintah digunakan untuk alokasi belanja barang dan jasa maka akan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru dan menekan jumlah pengangguran di daerah tersebut.

2.3 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut:





Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai teori dan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga upah berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran di Pulau Jawa dan Bali tahun 2016-2023
2. Diduga investasi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di Pulau Jawa dan Bali tahun 2016-2023
3. Diduga IPM berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di Pulau Jawa dan Bali tahun 2016-2023
4. Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di Pulau Jawa dan Bali tahun 2016-2023

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian berdasarkan pada data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penaksiran kuantitatif (Elvianto & Dwi, 2015). Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, dengan menggunakan data panel. Data panel merupakan kombinasi dari data cross section dan data *time series*, di mana unit *cross section* yang sama diamati atau diukur pada periode waktu yang berbeda. Dengan demikian, data panel dapat diartikan sebagai kumpulan data yang berasal dari beberapa individu yang sama, yang diperoleh melalui pengamatan selama rentang waktu tertentu (Widodo, 2023). Sumber data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik. Adapun penelitian ini menggunakan data berupa provinsi yang ada di Pulau Jawa dan Bali dengan periode tahun 2016-2023.

3.2 Variabel Operasional

Variabel Dependen

1. Pengangguran

Pengangguran adalah seseorang yang ingin bekerja tapi belum mendapatkan pekerjaan dan tidak berperan dalam proses produksi barang dan jasa. Menurut teori Keynes yang menyatakan bahwa pengangguran yang terjadi di masyarakat disebabkan adanya kekurangan permintaan umum terhadap barang dan jasa, sehingga tingkat upah yang tidak fleksibel dalam pasar tenaga kerja (Suhendra dan Bayu, 2016). Dapat dikatakan bahwa pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja, yang telah berusaha mencari pekerjaan, tetapi belum memperolehnya. Pada penelitian ini menggunakan data pengangguran terbuka dari BPS dalam satuan persen.

Variabel Independen

1. Upah

Upah merupakan kompensasi yang diberikan kepada pekerja sebagai imbalan atas jasa fisik dan mental yang mereka berikan kepada pengusaha. Sedangkan, upah minimum provinsi adalah batas upah terendah yang berlaku secara seragam di seluruh kabupaten atau kota dalam satu provinsi (Putri & Hutabarat, 2024). Satuan data yang digunakan pada penelitian ini adalah Rupiah.

2. Investasi

Investasi merupakan sebuah bentuk pengeluaran modal yang bertujuan untuk pembelian suatu barang hasil produksi yang akan dijadikan aset untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada modal awal (Piang dkk, 2023). Satuan data yang digunakan pada penelitian ini adalah Rupiah.

3. IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah indikator yang mengukur pencapaian pembangunan manusia berdasarkan beberapa komponen dasar kualitas hidup yang berpengaruh terhadap produktivitas individu (Mahroji dan Lin, 2019). Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2016) menjelaskan bahwa IPM disusun berdasarkan tiga dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dalam penelitian ini, data akan disajikan dalam satuan persentase.

4. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah salah satu instrumen dalam kebijakan fiskal yang mencakup seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah, di mana pengeluaran tersebut diharapkan menghasilkan manfaat atau balas jasa secara langsung bagi pemerintah. Terdapat istilah lainnya yaitu belanja pemerintah, yang diartikan sebagai pengeluaran atau belanja barang dan jasa oleh pemerintah lokal, negara bagian, hingga pemerintah federal, termasuk

di dalamnya adalah biaya upah pegawai pemerintah (Kusumaningtyas dan Muchtolifah, 2023). Satuan data yang digunakan pada penelitian ini adalah Milyar Rupiah.

3.3 Metode Analisis

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yang dikatakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (upah, investasi, IPM dan pengeluaran pemerintah) terhadap variabel dependen (pengangguran) (Mahihody et al., 2018). Regresi linier berganda data panel merupakan analisis regresi dengan struktur data yang merupakan data panel. Regresi data panel yaitu model yang mempelajari kelompok entitas yang sama (individu, provinsi, negara bagian, provinsi, dan sejenisnya) dari waktu ke waktu. (Napitupulu dkk, 2021).

3.3.2 *Fixed Effect Model*

Asumsi awal bahwa nilai *intercept* dan *slope* bersifat konstan baik antar waktu maupun antar provinsi seringkali tidak merefleksikan realitas. Ketidakstabilan ini dapat disebabkan oleh variabel-variabel yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam model persamaan. Dengan kata lain, nilai *intercept* berpotensi bervariasi untuk setiap individu atau periode waktu. Pemikiran ini menjadi landasan teoretis dalam perumusan model tersebut.

3.3.3 *Random Effect Model*

Pada model *fixed effect*, perbedaan antar individu maupun antar waktu ditunjukkan melalui variasi pada nilai *intercept*. Sebaliknya, dalam model *random effect*, perbedaan tersebut dimasukkan ke dalam *error term*. Pendekatan ini juga mempertimbangkan kemungkinan adanya korelasi dalam *error*, baik sepanjang *time series* maupun *cross section*.

3.3.4 Uji Model

Beberapa pengujian yang dapat dilakukan untuk memilih model yang paling tepat yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji *Lagrange*. Tidak seluruh model prediksi data panel cocok diterapkan. Penerapan model prediksi data panel secara universal tidak selalu relevan. Mengingat setiap provinsi dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal yang beragam, maka diperlukan serangkaian uji diagnostik untuk mengidentifikasi model regresi data panel yang paling tepat dan efisien.

3.3.4.1 Uji Chow Test

Untuk menentukan model regresi data panel yang paling tepat, dapat dilakukan dengan menambahkan variabel *dummy* guna mengidentifikasi adanya perbedaan nilai *intercept* antar individu. Pengujian ini dilakukan menggunakan uji F-statistik, yang bertujuan untuk mengevaluasi apakah metode *Fixed Effect* lebih sesuai dibandingkan dengan model *Common Effect* yang tidak menggunakan variabel *dummy*. Salah satu bentuk uji F ini adalah Chow Test, yang digunakan untuk menentukan apakah model *Common Effect* atau *Fixed Effect* lebih tepat dalam mengestimasi data panel. Kriteria Hasil:

H0: Pilih PLS (CE)

H1: Pilih FE (FE)).

3.3.4.2 Uji Hausman

Dalam analisis data panel, Uji Hausman merupakan instrumen statistik yang digunakan untuk menyeleksi antara metode *Fixed Effect* (FE) dan *Random Effect* (RE). Uji ini didasarkan pada prinsip bahwa estimator *Least Squares Dummy Variables* (LSDV) dalam metode FE dan *Generalized Least Squares* (GLS) dalam metode RE adalah efisien, sedangkan estimator *Ordinary Least Squares* (OLS) dalam metode *Common Effect* (CE) tidak efisien.

Sebaliknya, kondisi alternatifnya adalah ketika OLS efisien dan GLS tidak efisien. Dengan demikian, *Hausman Test* menjadi kriteria statistik untuk menentukan model estimasi mana yang lebih tepat antara *Fixed Effect* dan *Random Effect*.. Kriteria Hasil:

H0: Pilih RE

H1: Pilih FE.

3.3.5 Uji Statistik

3.3.5.1 Uji T

Uji parsial (uji t) bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Adapun ketentuannya yaitu:

H0: $\beta_1 = 0$ (tidak memiliki pengaruh yang signifikan)

H1: $\beta_1 > 0$ (memiliki pengaruh yang signifikan).

3.3.5.2 Uji F

Uji Simultan (uji F) bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F ini dilakukan dengan menggunakan nilai signifikansi dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H0 : $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ (tidak memiliki pengaruh yang signifikan)

H1 : $\beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ (memiliki pengaruh yang signifikan).

3.3.5.3 Koefisien Determinasi

Uji kelayakan model adalah uji R^2 untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel

dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 - 1. Apabila nilai R^2 dikalikan 100%, maka hal ini menunjukkan persentase keragaman (informasi) di dalam variabel Y yang dapat diberikan oleh model regresi yang didapatkan. Semakin besar nilai R^2 , semakin baik model regresi yang diperoleh (Napitupulu, 2021).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menerapkan jenis data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan jurnal terdahulu sebagai referensi dalam penelitian ini. Adapun data yang digunakan pada penelitian ini adalah data panel yang terdiri dari 7 provinsi di Pulau Jawa dan Bali meliputi Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali pada periode tahun 2016-2023. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen yang terdiri dari upah, investasi, indeks pembangunan manusia (IPM) dan pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran sebagai variabel dependen.

Metode yang akan dipilih dalam menganalisis penelitian ini adalah regresi data panel. Analisis regresi data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan estimasi: *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Untuk menentukan model yang paling sesuai dan efisien dalam konteks penelitian, ketiga model ini harus dievaluasi secara komprehensif. Tahap selanjutnya setelah estimasi adalah memilih model terbaik dengan menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman, yang dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan *software* statistik seperti *Eviews* 12.

4.3 Pemilihan Model Regresi

4.3.3 Uji Chow

Uji Chow bertujuan untuk menentukan model yang terbaik antara pendekatan *Common Effect* atau pendekatan *Fixed Effect* yang akan digunakan untuk melakukan regresi data panel.

Tabel 4.2 Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob
Cross Section F**	27.260	(6,44)	0.000
Cross Section Chi Square**	85.318	6	0.000

Sumber: Olah data menggunakan Eviews 12

** Menggunakan tingkat signifikansi 5%

Pada Uji chow yang dilakukan dalam penelitian ini mendapatkan hasil Prob. F sebesar 0.000 sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji chow menolak H_0 karena Prob. F lebih kecil dari 0.05. Artinya model yang dipilih dalam uji chow adalah *Fixed Effect Model*.

4.3.2 Uji Hausman

Uji Hausman bertujuan untuk menentukan model yang terbaik antara pendekatan *Random Effect* dan *Fixed Effect* yang sebaiknya dilakukan dalam pemodelan data panel.

Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-sq. Statistic	Chi-sq. df	Prob.
--------------	----------------------	------------	-------

Cross-Section	65.401	4	0.000
Random**			

Sumber: Olah data menggunakan Eviews 12

** Menggunakan tingkat signifikansi 5%

Berdasarkan hasil uji hausman yang dilakukan pada penelitian ini didapatkan Prob chi sebesar 0.000 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji hausman menolak H0 karena nilai Prob chi lebih kecil dari 0.05. Artinya model yang terpilih pada uji hausman adalah *Fixed Effect Model*.

4.4 Model Terbaik

Berdasarkan hasil pengujian model yang telah dilakukan melalui uji chow dan uji hausman menunjukkan bahwa model terbaik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*.

Tabel 4.4 *Fixed Effect Model*

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-50.121	13.090	-3.829	0.000
UPAH***	-3.79E-06	6.06E-07	-6.246	0.000
INVESTASI	2.00E-05	1.32E-05	1.512	0.137
IPM***	0.919	0.190	4.820	0.000
GOVEX*	-5.68E-05	2.97E-05	-1.914	0.062
R-Squared				0.8996
F-Statistic			39.440	0.000

Sumber: Olah data menggunakan Eviews 12

*** Signifikan pada alpha 1%

* Signifikan pada alpha 10%

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi didapatkan sebesar 0.8996. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan gabungan dari variabel independen yaitu upah, investasi, indeks pembangunan manusia (IPM) dan pengeluaran pemerintah (Govex) dapat menjelaskan variabel dependen pengangguran sebesar 89.96%. Sedangkan sisanya 10.04% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

4.5.2 Uji F

Berdasarkan Uji F pada *Fixed Effect Model* didapatkan hasil Prob F sebesar 0.000 dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji F menolak H_0 karena nilai Prob. F lebih kecil dari 0.05 artinya seluruh variabel independen yaitu upah, investasi, indeks pembangunan manusia (IPM) dan pengeluaran pemerintah (Govex) secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu pengangguran di Pulau Jawa dan Bali.

4.5.3 Uji T

a. Upah

Berdasarkan uji T yang dilakukan dengan menggunakan *Fixed Effect Model* didapatkan nilai Prob. sebesar 0.000. Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0.05 maka dapat diputuskan menolak H_0 karena nilai Prob. lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan. Artinya, terdapat pengaruh signifikan dari upah terhadap pengangguran di Pulau Jawa dan Bali. Lalu, Koefisien yang diperoleh menunjukkan nilai $-3.79E-06$, yang

berarti setiap peningkatan satu persen pada upah maka akan menurunkan pengangguran di Pulau Jawa dan Bali sebanyak $-3.79E-06$ persen.

b. Investasi

Berdasarkan hasil uji T pada *Fixed Effect Model* didapatkan hasil Prob. sebesar 0.131 dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 5% atau 0.05. Maka dapat diputuskan gagal menolak H_0 karena lebih besar dari 0.05 artinya investasi tidak memiliki pengaruh terhadap pengangguran di Pulau Jawa dan Bali.

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan uji T yang dilakukan dengan menggunakan *Fixed Effect Model* didapatkan nilai Prob. sebesar 0.000. Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0.05 maka dapat diputuskan menolak H_0 karena nilai Prob. lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan. Artinya, terdapat pengaruh signifikan dari IPM terhadap pengangguran di Pulau Jawa dan Bali. Lalu, Koefisien yang diperoleh menunjukkan nilai 0.919, yang berarti setiap peningkatan satu persen pada IPM maka akan meningkatkan pengangguran di Pulau Jawa dan Bali sebanyak 0.919 persen.

d. Pengeluaran Pemerintah (Govex)

Berdasarkan uji T yang dilakukan dengan menggunakan *Fixed Effect Model* didapatkan nilai Prob. sebesar 0.062. Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 10% atau 0.10 maka dapat diputuskan menolak H_0 karena nilai Prob. lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan. Artinya, terdapat pengaruh signifikan dari Pengeluaran Pemerintah terhadap pengangguran di Pulau Jawa dan Bali. Lalu, Koefisien yang diperoleh menunjukkan nilai $-5.68e05$, yang berarti setiap peningkatan sepuluh persen pada pengeluaran pemerintah maka akan menurunkan pengangguran di Pulau Jawa dan Bali sebanyak $-5.68e05$ persen.

4.6 Analisis Ekonomi

4.6.1 Hubungan Variabel Upah terhadap Pengangguran

Berdasarkan hasil analisis pengolahan data, hasilnya menunjukkan bahwa upah memiliki pengaruh signifikan secara negatif terhadap pengangguran di Pulau Jawa dan Bali. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas sebesar 0.000 yang lebih kecil dari alpha 5% dan memiliki koefisien yang negatif. Artinya kenaikan jumlah upah yang telah ditentukan akan menurunkan angka pengangguran yang terjadi di Pulau Jawa dan Bali.

Pemerintah menetapkan upah minimum sebagai bagian dari usaha untuk menciptakan kesetaraan di antara rakyatnya. Tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk mencegah pekerja menerima upah yang terlalu rendah, sehingga upah yang diterima mencerminkan kinerja mereka dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Peningkatan upah minimum yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja akan mendorong peningkatan konsumsi dan tabungan rumah tangga. Hubungan negatif antara upah dan pengangguran didukung oleh beberapa faktor yaitu upah yang lebih tinggi dapat meningkatkan daya beli pekerja, mendorong konsumsi, dan pada akhirnya meningkatkan permintaan barang dan jasa yang dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Selain itu, upah yang lebih tinggi juga dapat menarik lebih banyak individu untuk memasuki pasar tenaga kerja, mengurangi tingkat pengangguran.

Temuan ini sejalan dengan Teori Kurva Phillips, yang menggambarkan hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat upah dalam jangka pendek. Kenaikan upah minimum, sering kali ditetapkan pemerintah tanpa mempertimbangkan kondisi pasar, dapat menyebabkan kekakuan upah. Serikat pekerja juga dapat mempengaruhi kenaikan upah minimum untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Mankiw (2012) menyatakan bahwa kenaikan ini dapat mendorong pencari kerja untuk menerima tawaran pekerjaan yang ada, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Hasil ini bertentangan dengan teori permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kenaikan upah di atas tingkat keseimbangan pasar berpotensi menimbulkan kelebihan penawaran tenaga kerja (*excess supply*). Artinya, semakin banyak orang yang ingin bekerja karena tertarik dengan upah tinggi, namun perusahaan justru mengurangi permintaan tenaga kerja karena biaya produksi meningkat. Hal ini mengakibatkan sebagian tenaga kerja tidak terserap dan berujung pada meningkatnya angka pengangguran. Dengan demikian, secara teoritis, terdapat hubungan positif antara upah dan pengangguran: semakin tinggi upah yang ditetapkan, semakin tinggi pula tingkat pengangguran.

Pemberian upah minimum yang layak sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya menetapkan kebijakan upah yang sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak bagi pekerja. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat menunjukkan adanya kenaikan *output* perkapita sehingga akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pemerintah diharapkan terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan memperluas lapangan pekerjaan sehingga angkatan kerja yang ada dapat terserap (Effendy, 2019). Hasil pengolahan data ini sejalan dengan penelitian Effendy (2019), Fikri & Anis (2023), Sembiring & Sasongko (2019) yang menyatakan bahwa peningkatan upah minimum diikuti dengan penurunan angka pengangguran di Indonesia.

4.6.2 Hubungan Variabel Investasi terhadap Pengangguran

Hasil pengujian data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Pulau Jawa dan Bali. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas sebesar 0.137 dimana lebih besar dari alpha 5% dengan koefisien yang positif. Artinya naik turunnya nilai investasi yang ada tidak memberikan pengaruh terhadap perubahan angka pengangguran yang terjadi di Pulau Jawa dan Bali.

Ketidaksesuaian hasil ini dengan hipotesis penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya dapat didukung oleh peningkatan investasi di Pulau Jawa dan Bali diikuti dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja, sehingga kesempatan kerja yang tersedia sebelumnya belum mampu menampung angkatan kerja baru tersebut. Selain itu, persebaran investasi di Pulau Jawa dan Bali yang belum merata antar daerah, dimana sebagian besar investasinya berada di pusat kota. Kesenjangan yang relatif besar mengenai realisasi investasi di kota/kabupaten Pulau Jawa dan Bali, sehingga peningkatan penyerapan tenaga kerja yang tinggi hanya terjadi pada beberapa kabupaten/kota, sedangkan kota/kabupaten lainnya memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang rendah sehingga pengangguran tetap tinggi (Soekarnoto, 2014).

Tingginya tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa dan Bali sebagian disebabkan oleh kurangnya pemetaan potensi tenaga kerja di setiap daerah. Untuk mempermudah pencari kerja, setiap wilayah di Pulau Jawa dan Bali perlu melakukan pemetaan tenaga kerja sesuai dengan keterampilan dan keahlian. Informasi pemetaan ini akan membantu menarik investor yang sesuai dengan potensi pasar tenaga kerja lokal dan mengurangi ketidakcocokan antara perusahaan dan tenaga kerja yang dicari, yang selama ini sering terjadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Veronika & Mafruhah (2022) dan Yanti, Annam & Adda yang menyatakan bahwa investasi tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat pengangguran.

4.6.3 Hubungan Variabel Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pengangguran

Berdasarkan analisis pengolahan data, hasilnya menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia (IPM) memiliki pengaruh signifikan terhadap pengangguran di Pulau Jawa dan Bali. Hal ini dikarenakan nilai probabilitas IPM sebesar 0.000 dimana lebih kecil dari dari alpha 5% dan koefisien yang positif. Artinya naiknya tingkat IPM yang ada dapat

memberikan pengaruh terhadap perubahan angka pengangguran yang terjadi di Pulau Jawa dan Bali.

Hubungan antara IPM dan pengangguran yang bersifat positif dapat didorong oleh kenaikan IPM di Pulau Jawa dan Bali sehingga menciptakan sumber daya yang berkualitas dan terampil, tetapi tidak diikuti dengan perluasan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini tetap akan meningkatkan angka pengangguran yang ada. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia akan mengakibatkan para pencari kerja cenderung selektif mengenai pekerjaan karena ingin mendapatkan upah yang lebih tinggi dan sesuai dengan kualitas pendidikan yang dimilikinya. Banyak lulusan perguruan tinggi yang menganggur karena keterbatasan kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan yang ada tidak sesuai dengan bidang yang diminati, sehingga pengangguran terdidik akan tetap ada dan cenderung meningkat. Maka dari itu, kenaikan pada tingkat IPM mendorong tingkat pengangguran meningkat juga. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2023) bahwa IPM berpengaruh positif terhadap pengangguran.

4.6.4 Hubungan Variabel Pengeluaran Pemerintah terhadap Pengangguran

Hasil pengujian data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terhadap pengangguran di Pulau Jawa dan Bali. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas sebesar 0.062 yang lebih kecil dari alpha 10% dan memiliki koefisien yang negatif. Artinya kenaikan pengeluaran pemerintah yang telah ditentukan akan menurunkan angka pengangguran yang terjadi di Pulau Jawa dan Bali.

Menurut teori ekonomi Keynesian, seperti yang dijelaskan oleh Sukirno (2010) pengeluaran pemerintah khususnya anggaran memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Adanya intervensi dari

pemerintah dengan kebijakan fiskal ekspansif melalui peningkatan belanja negara di sektor-faktor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan akan mendorong permintaan secara agregat, meningkatkan produksi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Kebijakan tersebut akan membuat *Multiplier Effect*. Dimana kenaikan belanja pemerintah akan menghasilkan peningkatan pendapatan nasional yang lebih besar, yang pada gilirannya akan meningkatkan konsumsi dan investasi masyarakat. Dengan demikian, menurut pandangan Keynesian, belanja pemerintah dapat menjadi alat yang efektif untuk menurunkan pengangguran.

Saraireh (2020) mengatakan bahwa dalam jangka panjang, peningkatan pengeluaran pemerintah pada sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan dapat menurunkan tingkat pengangguran. Peningkatan pengeluaran pemerintah dan penataan kelembagaan yang lebih baik terbukti efektif dalam menekan angka pengangguran. Lalu semakin baik kualitas kelembagaan suatu negara, semakin signifikan dan kuat efek pengeluaran pemerintah dalam mengurangi pengangguran (Pham, 2024).

Pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan dalam mengurangi pengangguran memiliki arti bahwa pengeluaran pemerintah di provinsi-provinsi yang ada di pulau Jawa dan Bali sudah cukup tepat sasaran dan efektif. Pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dapat meningkatkan sumber daya manusianya dalam segi pengetahuan yang pada akhirnya meningkatkan kualitas SDM dan hal tersebut dapat menghasilkan tenaga kerja yang produktif yang pada akhirnya terserap oleh lapangan kerja yang ada. Pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan juga memberikan kontribusi dalam menurunkan tingkat pengangguran yang terjadi di Jawa dan Bali. Semakin tingginya pengetahuan dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan akan membuat produktivitas tenaga kerja meningkat sehingga para pengangguran dapat terserap. Pengeluaran pemerintah terhadap infrastruktur juga memiliki peran yang penting dalam menanggulangi

pengangguran. Infrastruktur pendukung yang baik dapat menarik perhatian investor yang pada akhirnya dapat membuka lapangan pekerjaan baru.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aryanti & Marhaeni (2022) yang menemukan hasil bahwa semakin tingginya pengeluaran pemerintah di Bali dapat menurunkan pengangguran yang terjadi. Bukan hanya di Jawa dan Bali, hasil ini juga sejalan dengan penelitian Saraireh (2020) yang mengatakan bahwa di Yordania peningkatan pengeluaran pemerintah dalam jangka panjang dapat menurunkan angka pengangguran. Lalu dalam jangka pendek, pengeluaran pemerintah dan pengangguran saling terkait satu sama lain.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh upah, investasi, indeks pembangunan manusia (IPM), dan pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran di Pulau Jawa dan Bali pada periode 2016–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat pengangguran, yang berarti kebijakan upah minimum mampu memberikan efek negatif terhadap pengangguran di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Sebaliknya, investasi tidak terbukti berpengaruh signifikan, mengindikasikan bahwa peningkatan investasi tidak serta merta diikuti dengan penurunan pengangguran yang ada pada wilayah Pulau Jawa dan Bali, khususnya jika investasi bersifat padat modal atau terpusat di wilayah tertentu saja. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif terhadap pengangguran, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kualitas sumber daya manusia dengan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dan peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak selalu diikuti oleh penyediaan lapangan kerja yang sesuai, sehingga justru meningkatkan pengangguran terdidik. Adapun pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan pengangguran, terutama melalui belanja pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Secara simultan, seluruh variabel independen terbukti memengaruhi pengangguran di Jawa–Bali.

5.1 Implikasi

Implikasi dari hasil analisis dan pembahasan mengenai upah, investasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran di Pulau Jawa dan Bali selama periode 2016–2023. Pertama, pemerintah pusat maupun daerah di Pulau Jawa dan Bali perlu berhati-hati dalam menetapkan kebijakan upah minimum. Sesuai dengan teori pasar kerja dan hasil penelitian, kenaikan upah yang terlalu tinggi dapat mendorong peningkatan pengangguran karena perusahaan mengurangi penyerapan tenaga

kerja. Oleh sebab itu, kebijakan upah harus mempertimbangkan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja, produktivitas, dan kemampuan dunia usaha, sehingga tidak menimbulkan beban berlebihan bagi sektor industri maupun pariwisata yang dominan di Jawa–Bali.

Kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Hal ini mengindikasikan bahwa investasi yang masuk masih cenderung padat modal dan belum sepenuhnya diarahkan pada sektor padat karya. Pemerintah perlu mendorong investasi yang lebih berorientasi pada penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja lokal. Selain itu, pemerataan distribusi investasi di luar kawasan perkotaan besar di Jawa dan Bali penting dilakukan untuk mengurangi ketimpangan kesempatan kerja antarwilayah.

Ketiga, temuan bahwa IPM justru berpengaruh positif terhadap pengangguran menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kualitas tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja. Hal ini mencerminkan pengangguran terdidik yang semakin tinggi, khususnya di kawasan Jawa–Bali yang memiliki akses pendidikan luas namun keterbatasan lapangan kerja yang sesuai dengan kualifikasi lulusan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan *Link And Match* antara dunia pendidikan dengan kebutuhan industri, penguatan pendidikan vokasi, serta pelatihan berbasis kompetensi agar peningkatan kualitas manusia dapat sejalan dengan terserapnya tenaga kerja.

Keempat, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengeluaran pemerintah berperan penting dalam menekan tingkat pengangguran. Oleh sebab itu, alokasi anggaran pemerintah harus semakin diarahkan ke sektor-sektor strategis dengan multiplier effect tinggi, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pariwisata berkelanjutan di Bali. Belanja pemerintah yang tepat sasaran tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru yang lebih inklusif.

Akhirnya, mengingat Pulau Jawa dan Bali merupakan pusat pertumbuhan ekonomi nasional namun masih menghadapi tantangan besar dalam pengangguran, penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan ketenagakerjaan yang terintegrasi. Dengan pengaturan upah yang bijak, pengelolaan investasi yang berpihak pada tenaga kerja, peningkatan kualitas SDM yang sesuai kebutuhan pasar, dan pengeluaran pemerintah yang produktif, maka pertumbuhan ekonomi di Jawa–Bali dapat berjalan selaras dengan penurunan angka pengangguran secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D., Sudharyati, N., Putra, R. A., Ramdhan, N., Putra, M. I. N., & Putra, H. H. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dan Kemiskinan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jambi Selama Tahun 2017-2021. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.33087/Ekonomis.V7i1.1082>
- Aryanti, & Marhaeni. (2022). *PENGARUH UPAH MINIMUM, INVESTASI, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI | E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*.
<https://doi.org/10.24843/EEP.2022.V11.I07.P12>
- Azfirmawarman, D., Magriasti, L., & Yulhendri, Y. (2023). Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(5), 117–125. <https://doi.org/10.31004/Jpdk.V5i5.22864>
- Cut Nova Rianda, M. A. (2020). ANALISIS DAMPAK PENGANGGURAN BERPENGARUH TERHADAP INDIVIDUAL. *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 12(01), Article 01. <https://doi.org/10.47498/Tasyri.V12i01.358>
- Effendy, R. S. (2019). PENGARUH UPAH MINIMUM TERHADAP PENGURANGAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI INDONESIA. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.34152/Fe.14.1.115-124>
- Elvianto & Dwi Kartikasari. (2015). ANALISIS DATA PANEL UNTUK MENGUJI PENGARUH ESTIMASI BIAYA PRODUKSI TERHADAP HARGA JUAL PADA WORKSHOP PT MULTI KARYA BAJATAMA. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 3(1).

- Faizah, U. N., & Woyanti, N. (2023). Analisis Pengaruh Pendidikan, Partisipasi Kerja, Dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Di Provinsi Banten Tahun 2011-2020. *BISECER (Business Economic Entrepreneurship)*, 6(1), 48. <https://doi.org/10.61689/Bisecer.V6i1.386>
- Fikri, I., & Anis, A. (2023). Pengaruh Upah, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Inflasi Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.24036/Jkep.V5i1.14419>
- Garnella, R., A. Wahid, N., & Yulindawati, Y. (2020). PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DAN KEMISKINAN TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI ACEH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 21–35. <https://doi.org/10.22373/Jimebis.V1i1.104>
- Ghozali, A. A., & Aji, T. S. (2024). Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Di Jawa Barat: (The Effect Of Population, Minimum Wage And Economic Growth On Unemployment In West Java). *Independent: Journal Of Economics*, 4(2), 72–84.
- Hasibuan, L. S. (2023). ANALISIS PENGARUH IPM, INFLASI, PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DI INDONESIA. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.32696/Jp2sh.V8i1.2075>
- Badan Pusat Statistik (2024). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 4,82 Persen Dan Rata-Rata Upah Buruh Sebesar 3,04 Juta Rupiah Per Bulan*. Retrieved August 16, 2024, From <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2372/Tingkat-Pengangguran-Terbuka--Tpt--Sebesar-4-82-Persen-Dan-Rata-Rata-Upah-Buruh-Sebesar-3-04-Juta-Rupiah-Per-Bulan.html>

- Ishak, K. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Dan Inflikasi Terhadap Indeks Pembangunan Di Indonesia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 7(1), Article 1.
- Karisma, A., Subroto, W. T., & Hariyati, H. (2021). Pengaruh Pendidikan Dan Investasi Terhadap Pengangguran Di Jawa. *Journal Of Economic, Bussines And Accounting (COSTING)*, 5(1), 441–446. <https://doi.org/10.31539/Costing.V5i1.2620>
- Kusumaningtyas, T. A., & Muchtolifah, M. (2023). Pengaruh PMDN Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Melalui Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Banten. *Management Studies And Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(5), Article 5. <https://doi.org/10.37385/Msej.V4i6.2748>
- Kuswiyati, M., & Utomo, Y. P. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, IPM, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Investasi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.33087/Ekonomis.V6i2.615>
- Lamatenggo, O. F., Walewangko, E. N., & Layuck, I. A. C. (2019). PENGARUH INFLASI, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PENGANGGURAN DI KOTA MANADO. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(02), Article 02. <https://ejournal.unsrat.ac.id/V3/Index.php/Jbie/Article/View/25011>
- Lazuardi, M. A., & Santoso, D. B. (2024). ANALISIS TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN UPAH MINIMUM DI PROVINSI JAWA BARAT. *Journal Of Development Economic And Social Studies*, 3(3), 958–966. <https://doi.org/10.21776/Jdess.2024.03.3.23>
- Mahihody, A. Y., Engka, D. S., & Luntungan, A. Y. (2018). Pengaruh Upah Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pengangguran Di Kotamanado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(3), 24-34

- Mahroji, Dwi & Iin Nurkhasanah. (2019). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 9(1).
- Mankiw, N. Gregory. 2012. Makroekonomi. Jakarta: Erlangga.
- Nurjihadi, Muhammad. (2016). The Vicious Circle Of Poverty In Rural Society, Case Study Of Tobacco Farmers In The Rural Area Of Lombok Island. *Sodality*, 4(2).
- Pandiangan, F. O., Pasaribu, J., Girsang, D., Tarigan, M., & Lapikolly, R. D. E. (2021). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia Tahun 2000-2020. *Visi Sosial Humaniora*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.51622/Vsh.V2i1.445>
- Pham, T. K. T. (2024). Impact Of Government Expenditure On Unemployment In Asian Countries: Does Institutional Quality Matter? *International Journal Of Development Issues*, 24(2), 170–184. <https://doi.org/10.1108/IJDI-05-2024-0127>
- Piang, H. (2023). *PENGARUH INVESTASI DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA* [Masters, Universitas Hasanuddin]. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/25260/>
- Putri, T. L., & Hutabarat, R. E. (2024). Analisis Pengaruh Pengangguran, Penanaman Modal Dalam Negeri, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.21067/Jrpe.V9i1.9842>
- Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. (2014). *Badan Kebijakan Fiskal—Detail Kajian*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2014/12/31/133039478508722-Dampak-Belanja-Pemerintah-Terhadap-Pengangguran-Dan-Kemiskinan-Di-Indonesia>

- Radila, I. D., Priana, W., & Wahed, M. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Dan Kemiskinan Terhadap Pengangguran Di Provinsi Bali. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(6), 1054–1065. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i6.252>
- Saraireh, S. (2020). The Impact Of Government Expenditures On Unemployment: A Case Study Of Jordan. *Asian Journal Of Economic Modelling*, 8(3), 189–203. <https://doi.org/10.18488/journal.8.2020.83.189.203>
- Sari, N. R. F. (2016). PENGARUH VARIABEL EKONOMI MAKRO TERHADAP PENGANGGURAN TERDIDIKDI JAWA TIMUR TAHUN 2010-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.22219/jep.v14i1.3845>
- Sembiring, V. B. P., & Sasongko, G. (2019). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Upah Minimum, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran Di Indonesia Periode 2011 – 2017. *International Journal Of Social Science And Business*, 3(4), Article 4. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i4.21505>
- Soekapdjo, S., & Oktavia, M. (2021b). Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Ecodemica Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 5. <https://doi.org/10.31294/Eco.V5i2.10070>
- Soekarnoto, T. S. R. (2014). Pengaruh PDRB, Umk, Inflasi, Dan Investasi Terhadap Pengangguran Terbuka Di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2007—2011. *Majalah Ekonomi Universitas Airlangga*, 24(2), 4154.
- Sucitrawati, N. P., & Arka, S. (N.D.). PENGARUH INFLASI, INVESTASI, DAN TINGKAT UPAH TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI BALI.

- Suhendra, Indra & Bayu Hadi Wicaksono.(2016). 'TINGKAT PENDIDIKAN, UPAH, INFLASI, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGANGGURAN DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi-Qu*,6(1).
- Sukirno, S. (2010). *Mikro Ekonomi Teori Pengantar—2010*. <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/213736/Mikro-Ekonomi-Teori-Pengantar>
- Sun'an, M. (2018). THE EFFECT OF GOVERNMENT EXPENDITURE AND PRIVATE INVESTMENT ON WORK OPPORTUNITIES AND UNEMPLOYMENT RATE IN INDONESIA. *Russian Journal Of Agricultural And Socio-Economic Sciences*, 76(4), 92–100. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2018-04.10>
- Syahputra, A., Erfit, E., & Nurhayani, N. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi-Provinsi Di Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 8(2), 95–106. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v8i2.8323>
- Syam, Syahrina. (2015). Pengaruh Upah Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Makassar. *Jurnal IQTISADUNA*, 1(1).
- Todaro, Michael P. 2004. “Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Penerjemah: Haris Munandar”. Jakarta. Erlangga.
- Veronika, S., & Mafruhah, A. Y. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Dan Inflasi Terhadap Pengangguran Terdidik Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 139–146. <https://doi.org/10.29313/jrieb.vi.1290>
- Widodo, S. (2023). PENGARUH PENDAPATAN TRANSFER PUSAT, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah*

Keuangan Negara, 8(1), Article 1.
<https://doi.org/10.22212/jbudget.V8i1.155>

Yanti, N. F., Annam, H., & Adda H. W. (2019). *ANALISIS PENGARUH INFLASI, INVESTASI DAN PDRB TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI WILAYAH SULAWESI PERIODE 2010-2014*. E Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 4, April 2017 Hlm 138-149

Yuniarti, Q., & Imaningsih, N. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Sidoarjo. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.33087/Ekonomis.V6i1.474>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian

Tahun	Provinsi	UNMPL	Upah	investasi	IPM	Govex
2016	Jakarta	6.12	3980808	15,615.10	79.6	4,557.36
2017	Jakarta	7.14	4089123	51,857.30	80.06	9,303.64
2018	Jakarta	6.65	4415849	53,955.10	80.47	7,505.96
2019	Jakarta	6.54	4463388	66,217.80	80.76	7,934.86
2020	Jakarta	10.95	4224720	46,568.00	80.77	4,215.99
2021	Jakarta	8.5	4028744	58,038.80	81.11	6,140.45
2022	Jakarta	7.18	5255824	92,967.70	81.65	4,526.63
2023	Jakarta	6.53	5532624	100,032.10	82.46	3,872.42
2016	Jawa Barat	8.89	2788634	34,792.80	70.05	25,805.63
2017	Jawa Barat	8.22	3170803	43,533.50	70.69	24,054.88
2018	Jawa Barat	8.23	3202864	47,851.70	71.3	36,482.71
2019	Jawa Barat	8.04	3337573	55,165.20	72.03	33,117.93
2020	Jawa Barat	10.46	3073294	56,194.20	72.09	33,117.93
2021	Jawa	9.82	3083829	65,166.20	72.45	37,470.91

	Barat					
2022	Jawa Barat	8.31	3533613	87,342.80	73.12	32,644.21
2023	Jawa Barat	7.44	3674236	96,296.60	73.74	33,931.47
2016	Jawa tengah	4.63	1875026	25,101.10	69.98	80,510.00
2017	Jawa tengah	4.57	2010062	22,238.50	70.52	82,460.03
2018	Jawa tengah	4.47	2158681	29,847.60	71.12	76,605.67
2019	Jawa tengah	4.44	2190251	21,377.90	71.73	86,728.08
2020	Jawa tengah	6.48	2088172	31,969.70	71.87	84,708.28
2021	Jawa tengah	5.95	2074451	32,777.10	72.16	77,970.64
2022	Jawa tengah	5.57	2200716	27,354.30	72.79	81,981.45
2023	Jawa tengah	5.13	2321344	34,550.90	73.39	109,659.31
2016	DIY	2.72	1975721	24,089.90	78.38	3,847.96
2017	DIY	3.02	2186464	45,081.00	78.89	4,920.62
2018	DIY	3.37	2114031	33,414.40	79.53	5,296.40

2019	DIY	3.18	2311599	45,467.30	79.99	5,544.87
2020	DIY	4.57	2308710	55,670.30	79.97	5,433.18
2021	DIY	4.56	2272425	52,574.00	80.22	5,530.17
2022	DIY	4.06	2462583	65,469.80	80.64	5,449.94
2023	DIY	3.69	2705601	74,983.40	81.07	5,700.08
2016	Jawa Timur	4.21	2129937	16,272.50	69.74	23,859.95
2017	Jawa Timur	4	2238587	16,708.60	70.27	28,878.13
2018	Jawa Timur	3.91	2398992	19,971.00	70.77	30,662.09
2019	Jawa Timur	3.82	2479910	21,574.70	71.5	33,967.10
2020	Jawa Timur	5.84	2389494	32,721.20	71.71	32,286.75
2021	Jawa Timur	5.74	2368719	27,838.70	72.14	33,852.93
2022	Jawa Timur	5.49	2638752	34,417.90	72.75	31,502.86
2023	Jawa Timur	4.88	2654068	42,712.70	73.38	34,290.00
2016	Banten	8.92	3531518	3,367.50	70.96	34,876.17
2017	Banten	9.28	3732904	3,342.10	71.42	36,716.10
2018	Banten	8.47	3873876	8,959.00	71.95	37,871.62

2019	Banten	8.11	3842833	8,167.00	72.44	37,871.62
2020	Banten	10.64	3693411	4,827.00	72.45	34,638.76
2021	Banten	8.98	3782482	4,951.30	72.72	36,406.18
2022	Banten	8.09	4370278	5,685.70	73.32	37,961.90
2023	Banten	7.52	4378058	9,467.10	73.87	39,455.10
2016	Bali	1.89	2788711	932.9	73.65	5,420.93
2017	Bali	1.48	2871519	1,479.40	74.3	6,070.54
2018	Bali	1.4	2.893 .39	2,551.40	74.77	5,998.55
2019	Bali	1.57	2988555	7,819.20	75.38	6,518.31
2020	Bali	5.63	2446534	5,726.00	75.5	6,358.12
2021	Bali	5.37	2388382	6,807.20	75.69	6,270.67
2022	Bali	4.8	3002534	6,451.60	76.44	6,749.44
2023	Bali	2.69	3380840	7,759.30	77.1	6,607.10

Lampiran 2. *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: UNMPL

Method: Panel Least Squares

Date: 12/24/24 Time: 14:15

Sample: 2016 2023

Periods included: 8

Cross-sections included: 7

Total panel (unbalanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-50.12082	13.09037	-3.828832	0.0004
UPAH	-3.79E-06	6.06E-07	-6.245624	0.0000
INVESTASI	2.00E-05	1.32E-05	1.512556	0.1375
IPM	0.917724	0.190440	4.818958	0.0000
GOVEX	-5.68E-05	2.97E-05	-1.914326	0.0621

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.899635	Mean dependent var	6.013818
Adjusted R-squared	0.876825	S.D. dependent var	2.400175
S.E. of regression	0.842373	Akaike info criterion	2.671668
Sum squared resid	31.22202	Schwarz criterion	3.073134
Log likelihood	-62.47086	Hannan-Quinn criter.	2.826918
F-statistic	39.44006	Durbin-Watson stat	2.314676
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 3. *Random Effect Model*

Dependent Variable: UNMPL
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 12/24/24 Time: 14:21
 Sample: 2016 2023
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 7
 Total panel (unbalanced) observations: 55
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.240688	7.954520	0.030258	0.9760
UPAH	-4.82E-07	4.05E-07	-1.191263	0.2392
INVESTASI	7.97E-06	1.04E-05	0.763368	0.4488
IPM	0.088461	0.109675	0.806581	0.4237
GOVEX	1.06E-05	1.48E-05	0.714158	0.4785
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			1.122485	0.6397
Idiosyncratic random			0.842373	0.3603
Weighted Statistics				
R-squared	0.023971	Mean dependent var		1.549254
Adjusted R-squared	-0.054111	S.D. dependent var		1.217474
S.E. of regression	1.257248	Sum squared resid		79.03368
F-statistic	0.306999	Durbin-Watson stat		1.161283
Prob(F-statistic)	0.871947			
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.232429	Mean dependent var		6.013818
Sum squared resid	383.3907	Durbin-Watson stat		0.239391

Lampiran 4. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
 Equation: Untitled
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	27.260503	(6,44)	0.0000
Cross-section Chi-square	85.318494	6	0.0000

Lampiran 5. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	65.401472	4	0.0000